



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 911/281 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :** a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan unit kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  2. PT. Bank Jateng.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2020



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 911/281 TAHUN 2020  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	a. PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	SUMARNO, SE, MM NIP. 19700514 199202 1 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	<b>BELANJA SKPKD</b> 1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3 Belanja Tidak Terduga 4 Pembiayaan Daerah 5 Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan dan Penarikan Kembali Kesalahan Penyetoran Tahun Berkenaan.
2	a. Bendahara Pengeluaran PPKD	ANANDA AYYUB WARDHANA, S.IP NIP. 19910321 201010 1 002 Staf Sub Bagian Keuangan	
	b. Bendahara Penerimaan PPKD	NUGROHO SURATNO PUTRO, SE NIP. 19850120 200903 1 005 Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
	c. Bendahara Pengeluaran SKPD	LUSI AGUSTIN DWISARI, SE.Akt NIP. 19790828 200604 2 008 Staf Sub Bagian Keuangan	<b>BELANJA SKPD</b> <b>A. Kantor Induk</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> 1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah - Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan - Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Kegiatan Administrasi Keuangan - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3 Kegiatan Administrasi Umum - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</li> </ul>
			<b>4 Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> </ul>
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>
			<b>1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi APBD Kabupaten/Kota</li> <li>- Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota</li> <li>- Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</li> <li>- Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
			<b>B. Unit Pengelola Asrama Donohudan</b>
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
			<b>1 Kegiatan Administrasi Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> <li>- Penyediaan Alat Tulis Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Penyediaan Makanan dan Minuman</li> <li>- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</li> <li>- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Pengadaan Mebeleur</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</li> </ul>
d	Bendahara Penerimaan SKPD	<b>SUPARMANTO</b> NIP. 19770215 200801 1 007 Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
e	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	<b>SUMARDI, SH</b> NIP. 19730608 199903 1 004 Staf Bidang Aset	<b>BIDANG ASET DAERAH</b>



NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
	f <b>Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD</b>	<b>ENDANG PARIASIH</b> NIP. 19770201 200801 2 009 Staf Unit pengelola Asrama Donohudan	<b>UNIT ASRAMA DONOHUDAN</b>
3	a <b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG</b>	<b>DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac</b> NIP. 198012212006041010 Kepala Bidang Anggaran	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> 1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - Penyusunan KUA dan PPAS - Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD - Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD - Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD - Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD - Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
	b <b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>DIEN PAMELASIH, SH, MM</b> NIP. 19831205 200501 2 001 Staf Sub Bagian Keuangan	
4	a <b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG</b>	<b>SLAMET, AK</b> NIP. 19660215 198603 1 001 Kepala Bidang Akuntansi	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> 1 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
	b <b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>SIANITA TRI HARDANINGRUM, SE</b> NIP. 1910901 200604 2 010 Staf Sub Bagian Keuangan	
5	a <b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG</b>	<b>RUDI NUGROHO, SE, MM</b> NIP. 19700524 199603 1 003 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> 1 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Penatausahaan Pembiayaan Daerah - Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D - Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP - Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
	b <b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>PUTRA ADITAMA, A.Md</b> NIP. 19950317 201902 1 004 Staf Sub Bagian Keuangan	



NO	URAIAN	NAMA, NIP & JABATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3	4
6	a <b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG</b>	<b>ADI RAHARJO, S.STP, M.Si</b> NIP. 19780716 199703 1 001 Kepala Bidang Aset	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH</b> 1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
	b <b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>	<b>PUJI ARSIANTI, SE</b> NIP. 19650415 199303 2 007 Staf Sub Bagian Keuangan	- Penatausahaan Barang Milik Daerah - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah - Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah - Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD - Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah



GUBERNUR JAWA TENGAH ,

GANJAR PRANOWO